

**PENCEGAHAN FRAUD DI SEKTOR PUBLIK:
PERAN AUDIT INTERNAL**



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: JUSKA MEIDY ENYKE SJAM

NIM: 126232192

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

LAPORAN TUGAS AKHIR
PENCEGAHAN FRAUD DI SEKTOR PUBLIK:
PERAN AUDIT INTERNAL



DIAJUKAN OLEH:

NAMA: JUSKA MEIDY ENYKE SJAM

NIM: 126232192

UNTUK MEMENUHI SALAH SATU SYARAT
UNTUK KELULUSAN PADA PROGRAM STUDI
PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI AKUNTAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS TARUMANAGARA

JAKARTA

2024

**PENCEGAHAN FRAUD DI SEKTOR PUBLIK:
PERAN AUDIT INTERNAL**

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Disusun Oleh:



Juska Meidy Enyke Sjam

126232192

Disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing



R.X. Kurniawan Tjakrawala, S.E., M.Si., Ak., CA.

ABSTRAK

Fraud berdampak serius pada keuangan dan reputasi lembaga publik, sehingga penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat meminimalkan risiko insiden fraud. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi efektivitas peran audit internal dalam mencegah fraud di sektor publik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian mengidentifikasi beberapa faktor penyebab penipuan di sektor publik, antara lain tekanan keuangan, gaya hidup yang diinginkan, masalah perjudian, tekanan dari lingkungan keluarga, ketidakpuasan terhadap perusahaan, dan kesombongan. Faktor-faktor ini dapat menciptakan insentif untuk terlibat dalam perilaku penipuan. Selain itu, keberhasilan manajemen risiko dalam mengelola risiko fraud bergantung pada penerapan pengendalian internal yang efektif, pemantauan yang ketat, dan budaya organisasi yang mendukung integritas. Peran auditor internal sangat penting dalam mencegah kecurangan dengan mengidentifikasi potensi risiko, menguji efektivitas pengendalian internal, dan menciptakan lingkungan kerja yang transparan. Auditor internal juga berperan dalam menghilangkan penyebab kecurangan, menciptakan budaya yang menghargai kejujuran, menerapkan proses pemantauan yang efektif, dan membangun dasar akuntabilitas dan transparansi dalam administrasi pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pencegahan, Penipuan, Sektor Publik, Audit Internal, Manajemen Risiko, Pemerintah

ABSTRACT

Fraud has a serious impact on the finances and reputation of public institutions, so it is important to identify factors that can minimize the risk of fraud incidents. This research aims to analyze and evaluate the effectiveness of the role of internal audit in preventing fraud in the public sector. This research uses a qualitative approach with descriptive methods. The research results identified several factors that cause fraud in the public sector, including financial pressure, desired lifestyle, gambling problems, pressure from the family environment, dissatisfaction with the company, and arrogance. These factors can create incentives to engage in fraudulent behavior. In addition, the success of risk management in managing fraud risk depends on the implementation of effective internal controls, strict monitoring, and an organizational culture that supports integrity. The role of internal auditors is crucial in preventing fraud by identifying potential risks, testing the effectiveness of internal controls, and creating a transparent work environment. Internal auditors also play a role in eliminating the causes of fraud, creating a culture that values honesty, implementing an effective monitoring process, and building a basis for accountability and transparency in the administration of local government.

KEYWORDS: *Prevention, Fraud, Public Sector, Internal Audit, Risk Management, Government*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
ABSTRAK.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
1. Pendahuluan.....	1
2. Metode.....	4
3. Hasil dan Pembahasan.....	5
3.1 Faktor-faktor yang Menyebabkan Fraud di Sektor Publik.....	5
3.2 Peram Audit Internal dalam Mencegah Fraud di Sektor Publik.....	9
4. Kesimpulan.....	14
DAFTAR PUSTAKA.....	16

1. Pendahuluan

Sektor publik, yang umumnya diwakili oleh lembaga pemerintah, memainkan peran sentral dalam pembangunan dan administrasi negara. Meskipun lembaga pemerintah bertanggung jawab untuk mencapai tujuan negara, kita sering menyaksikan masalah serius seperti kecurangan atau penipuan (Maria et al, 2019). Tidak hanya terbatas pada tingkat pusat, tetapi juga menyebar ke tingkat daerah. Adanya fraud di lembaga pemerintah merupakan tantangan serius, mengingat dampaknya tidak hanya terbatas pada kerugian finansial, tetapi juga merusak reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Manossoh, 2016).

Pada kenyataannya, penipuan dalam konteks lembaga pemerintah bukanlah sesuatu yang mudah dideteksi. Pelaku penipuan cenderung melakukan langkah pencegahan agar tindakannya tidak terdeteksi (Pramudita, 2013). Para pemimpin di lembaga pemerintah perlu menjaga kewaspadaan terhadap potensi penipuan. Upaya pencegahan dan deteksi fraud perlu menjadi fokus utama, yang melibatkan peran audit internal yang efektif, perencanaan keuangan yang cermat, dan penerapan pengendalian internal yang ketat (FaisaL, 2013). Kesadaran akan risiko kecurangan perlu ditingkatkan, dan para pemimpin perlu terus meningkatkan kemampuannya untuk mengidentifikasi dan mengatasi potensi kecurangan yang dapat merugikan lembaga pemerintah itu sendiri dan masyarakat yang mereka layani (Apriadi & Fachriyah, 2014).

Rezaee & Riley (2005) mengidentifikasi tiga elemen kunci yang penting untuk mencegah penipuan di lingkungan organisasi. Pertama, menciptakan dan memelihara budaya yang menghargai kejujuran dan nilai-nilai etika yang tinggi adalah langkah mendasar. Ini melibatkan tinjauan kritis terhadap undang-undang dan peraturan, perekrutan karyawan yang sesuai dengan kualifikasi yang ditetapkan, dan promosi kebijakan yang mendukung suasana integritas. Pelatihan auditor internal juga menjadi instrumen penting dalam menciptakan budaya anti-fraud yang kuat, di mana peningkatan kualitas dan pemahaman auditor mengenai potensi risiko fraud menjadi kunci untuk menjalankan fungsi audit secara efektif (Young, 2013).

Kedua, implementasi dan evaluasi proses pengendalian anti fraud memiliki

peran krusial. Ini melibatkan identifikasi dan pengukuran risiko penipuan yang mungkin terjadi, diikuti dengan upaya untuk mengurangi kemungkinan risiko tersebut (Wulandari & Natasari, 2018). Penerapan dan pemantauan pengendalian internal secara berkelanjutan juga merupakan langkah penting untuk memitigasi potensi kecurangan. Dalam kerangka ini, penilaian risiko yang cermat dan penerapan kontrol yang efisien akan meningkatkan kemampuan organisasi untuk menanggapi ancaman penipuan secara proaktif (Handoyo, 2011). Akhirnya, pengembangan proses pemantauan atau proses pengawasan adalah pilar ketiga yang ditekankan oleh Rezaee & Riley (2005). Fungsi pengawasan yang tepat, yang melibatkan evaluasi efektivitas dan efisiensi proses pengendalian anti fraud yang telah diterapkan, dapat memperkuat kemampuan organisasi untuk memantau dan mencegah potensi tindakan fraud (Hikmah & Wondabio, 2023).

Keberadaan audit internal berperan kunci dalam mencegah fraud di sektor pemerintahan. Audit internal dapat dianggap sebagai bentuk pemeriksaan internal yang independen dan objektif, yang dirancang untuk memberikan kepercayaan yang memadai kepada pihak terkait, termasuk pemerintah dan masyarakat (Sawyer, 1995). Fungsi utama audit internal adalah memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan nilai tambah kegiatan organisasi melalui pemeriksaan sistematis terhadap sistem dan prosedur yang diterapkan. Dengan pendekatan ini, audit internal dapat memastikan bahwa kebijakan dan prosedur diterapkan dengan benar di semua unit kerja organisasi (Lin et al, 2011).

Tugas audit internal melibatkan evaluasi mendalam terhadap pelaksanaan tugas yang telah didelegasikan di masing-masing unit kerja organisasi. Melalui pengamatan, penelitian, dan pemeriksaan yang cermat, audit internal dapat mengidentifikasi potensi risiko penipuan dan mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan (Aresteria, 2018). Selain itu, audit internal juga berperan penting dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja organisasi secara komprehensif, memberikan rekomendasi dan saran konstruktif untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi (Kuntadi, 2023). Dengan demikian, audit internal tidak hanya bertindak sebagai kustodian keuangan dan kepatuhan, tetapi juga sebagai mitra

strategis yang mendukung pencapaian tujuan pemerintah dengan memberikan wawasan berharga dan solusi yang efektif (Fitriani & Hidayat, 2013).

Salsabilla & Prayudiawan (2011) menjelaskan bahwa audit internal bertujuan untuk menjadi mitra yang efektif bagi manajemen perusahaan dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dalam mencapai tujuan tersebut, auditor internal diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan melalui pemberian analisis yang objektif, penilaian, saran dan komentar terhadap aspek-aspek yang diperiksa (Saputra, 2017). Auditor internal diharapkan untuk melakukan serangkaian kegiatan yang meliputi penilaian kontrol akuntansi keuangan dan operasional, mengevaluasi kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan dan prosedur yang ditetapkan, serta melakukan pemeriksaan mendalam terhadap aspek-aspek seperti aset perusahaan, pembukuan yang akurat, dan kinerja eksekutif (Lupasc & Baragan, 2016).

Dengan merinci kegiatan yang dilakukan, Utami (2024) menyoroti bahwa audit internal perlu memeriksa dan menilai efektivitas kontrol atas akuntansi keuangan dan operasional perusahaan. Selain itu, auditor internal harus mengevaluasi hubungan pelaksana dengan kebijakan, rencana, dan prosedur yang telah ditetapkan, serta memeriksa aset perusahaan dengan cermat untuk mencegah potensi kerugian (Simanjuntak, 2018). Keabsahan pembukuan dan data perusahaan juga menjadi fokus auditor internal, yang diperlukan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diandalkan. Terakhir, menilai kinerja pelaksana dalam menyelesaikan tanggung jawabnya merupakan elemen penting dalam upaya audit internal untuk memberikan gambaran holistik tentang efektivitas manajemen perusahaan (Hakim & Suryatimur, 2022). Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya merupakan tindakan pencegahan terhadap potensi kecurangan, tetapi juga memberikan wawasan mendalam untuk mendukung manajemen dalam mengambil keputusan yang lebih baik (Rosidah et al, 2023).

Salah satu fungsi utama dalam pengawasan internal dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh inspektorat. Inspektorat, sebagai unsur pengawasan dalam administrasi pemerintahan daerah, memiliki peran penting di tingkat provinsi dan kabupaten/kota (Masdan et al, 2017). Fungsinya meliputi perencanaan program

pengawasan, perumusan kebijakan, dan memfasilitasi pengawasan, serta melibatkan kegiatan audit, investigasi, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah Provinsi bertugas membantu Gubernur dalam mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang berada di bawah kewenangan daerah serta memberikan bantuan kepada Perangkat Daerah (Marlaini et al, 2018).

Fakta di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak penyimpangan dalam pengawasan internal, terutama di instansi pemerintah daerah. Untuk meminimalisir terjadinya penyimpangan seperti penggunaan keuangan negara oleh pihak tertentu, pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan memerlukan badan pengawas daerah (Effendy, 2013). Dengan adanya badan pengawas daerah ini, pemerintah diharapkan dapat menghasilkan laporan audit yang berkualitas. Hasil audit mutu menunjukkan bahwa pengawasan dan pengelolaan keuangan pemerintah baik dan bertanggung jawab. Jika kualitas audit rendah, akan memberikan kelonggaran bagi lembaga pemerintah untuk melakukan penipuan (Akhmad et al, 2017).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, sejalan dengan pandangan Anggito & Setiawan (2018), yang menekankan bahwa penelitian kualitatif berupaya menggambarkan kegiatan dan dampak tindakan tersebut secara naratif terhadap kehidupan subjek penelitian. Pendekatan kualitatif dipilih karena peneliti ingin mengeksplorasi peran audit internal dalam mencegah fraud di sektor publik. Oleh karena itu, metode Literature Review dipilih untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang perkembangan topik peran audit internal dan pencegahan fraud di sektor publik. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh dari jurnal penelitian, buku, tesis, dan sumber lain yang relevan dengan tema penelitian, terutama jurnal sebelumnya yang terkait dengan topik penelitian. Sumber data diperoleh dari situs penyedia jurnal ilmiah agar tetap relevan dengan ruang lingkup

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmad, I., Mustanir, A., & Ramadhan, M. R. (2017). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Kabupaten Enrekang. *Sosial Politik & Ekonomi*, 7(1), 89-103.
- Anggito, A., & Setiawan, J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. CV Jejak (Jejak Publisher).
- Apriadi, R. N., & Fachriyah, N. (2014). Determinan Terjadinya Fraud di Institusi Pemerintahan. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Aresteria, M. (2018). Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud di Perguruan Tinggi: Literature Review. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 6(1), 45-53.
- Effendy, Y. (2013). Tinjauan hubungan opini WTP BPK dengan kasus korupsi pada pemda di Indonesia kajian manajemen keuangan pemerintah, hubungan antara masyarakat, pemerintah dan pemeriksa (auditor). *Jurnal Ilmiah Manajemen Dan Bisnis UMSU*, 13(1).
- Faisal, M. (2013). Analisis fraud di sektor pemerintahan kabupaten kodus. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).
- Fitriani, I., & Hidayat, Y. L. (2013). Pengaruh Objektivitas Dan Integritas Auditor Internal Terhadap Kualitas Audit. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol*, 1(1).
- Hakim, L. N., & Suryatimur, K. P. (2022). Efektivitas Peran Audit Internal Dalam Pencegahan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(3), 523-532.
- Handoyo, S. (2011). Sinergi antara Good Corporate Governance dan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dalam Meminimalisir dan Pencegahan Fraud dalam Suatu Organisasi. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 1257-1269.
- Hikmah, A. N., & Wondabio, L. S. (2023). Evaluasi Peranan Audit Internal pada Penerapan Strategi Anti Fraud. *Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3285-3294.

- Kuntadi, C. (2023). *Audit Internal Sektor Publik*. Penerbit Salemba.
- Kurniawan, D., & Reskino, R. (2023). Peran Good Corporate Governance terhadap Kecurangan Laporan Keuangan: Perspektif Fraud Pentagon pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 21(1), 111-129.
- Lin, S., Pizzini, M., Vargus, M., & Bardhan, I. R. (2011). The role of the internal audit function in the disclosure of material weaknesses. *The Accounting Review*, 86(1), 287-323.
- Lupasc, I., & Baragan, L. A. (2016). Aspects concerning the relationship between internal audit and fraud risk. In *International Conference Risk in Contemporary Economy*, 2016, <http://www.rce.feaa.ugal.ro/images/stories/RCE2016/LupascBaragan.pdf>.
- Manossoh, H. (2016). Faktor-faktor penyebab terjadinya fraud pada pemerintah di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Maria, E., Halim, A., Suwardi, E., & Miharjo, S. (2019). Eksplorasi Kesempatan Untuk Melakukan Fraud Di Pemerintah Daerah, Indonesia (Exploration Opportunities To Commit Fraud in Local Governments, Indonesia). *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 16(1), 1.
- Marlaini, M., Aliamin, A., & Indriani, M. (2018). Evaluasi Efektivitas Penguatan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dalam Paradigma Baru (Studi Kasus Pada Salah Satu Inspektorat di Aceh). *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec*, 4(1), 95-108.
- Masdan, S. R., Ilat, V., & Pontoh, W. (2017). Analisis kendala-kendala peningkatan kapabilitas aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) pada inspektorat kabupaten gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing" Goodwill"*, 8(2).
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. sage.
- Pramudita, A. (2013). Analisis fraud di sektor pemerintahan Kota Salatiga. *Accounting Analysis Journal*, 2(1).

- Rezaee, Z., & Riley, R. (2002). Prevention and detection.
- Rosidah, I., Kesumah, P., & Rizka, R. B. (2023). Transparasi Dan Akuntabilitas Dalam Pencegahan Fraud Diinstansi Pemerintah (Studi Kasus Kantor Kec. Ciwidey). *Jurnal Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi: Emba*, 2(1), 137-156.
- Salsabila, A., & Prayudiawan, H. (2011). Pengaruh akuntabilitas, pengetahuan audit dan gender terhadap kualitas hasil kerja auditor internal (Studi empiris pada Inspektorat Wilayah Provinsi DKI Jakarta). *Jurnal telaah dan riset akuntansi*, 4(2), 155-175.
- Saputra, A. (2017). Pengaruh Sistem Internal Kontrol, Audit Internal dan Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kecurangan (Fraud) Perbankan (Studi Kasus pada Bank Syariah Anak Perusahaan BUMN di Medan). *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Sawyer, L. B. (1995). An internal audit philosophy. *Internal Auditor*, 52(4), 46-56.
- Simanjuntak, T. P. (2018). Pengaruh Audit Internal Terhadap Efektivitas Pengendalian Intern Persediaan Barang Pada PT Swastikalautan Nusa Persada Medan. *Jurnal Darma Agung*, 26(1), 421-435.
- Tuanakotta Theodorus, M. (2007). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigasi*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Utami, A. P., Vinalia, N., Febriyan, I., Putra, B. G., & Manurung, H. (2024). Peran Audit internal atas kualitas Pemeriksaan Laporan keuangan yang dilakukan oleh audit eksternal pada sebuah perusahaan. *Jurnal Rimba: Riset Ilmu manajemen Bisnis dan Akuntansi*, 2(1), 54-63.
- Wulandari, R., & Natasari, D. (2018). Desain dan Arsitektur untuk Memitigasi Fraud pada Organisasi Bisnis. *Jurnal Gama Societa*, 1(1), 80-89.
- Young, M. R. (2013). *Financial fraud prevention and detection: governance and effective practices*. John Wiley & Sons.